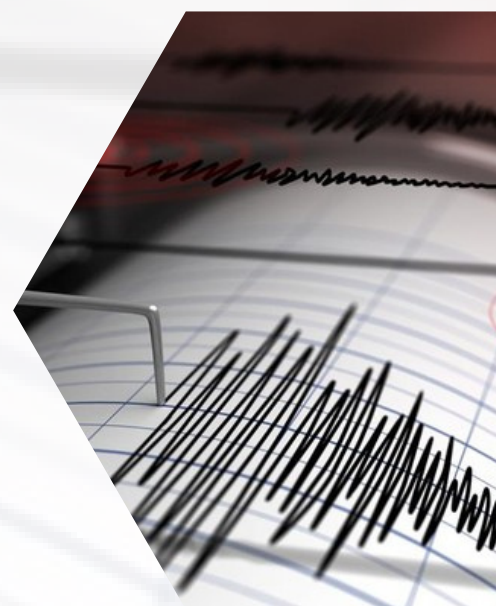




RENCANA KERJA

2024



**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

PROVINSI MALUKU

 Jl. Dr. Malaihollo No. 57 Taman Makmur, Ambon
 0911-316041 / 0911-316042
 <https://bpbd.malukuprov.go.id>
 bpbd@malukuprov.go.id

KATA PENGANTAR

Setiap instansi memiliki target pencapaian kinerja setiap tahunnya yang harus diemban sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka perlu ditetapkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilakukan. Penetapan program dan kegiatan dimaksud sedianya dilakukan pada tahapan perencanaan.

Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 telah menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang salah satunya adalah penyusunan Renja OPD.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan RKPD serta diharapkan dapat dipedomani dan ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024.

Ambon, Maret 2023

**Kepala Pelaksana
BPBD Provinsi Maluku,**



Ir. ISMAIL USEMAHU, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19650413 199303 1 009

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	1
	1.3. Maksud dan Tujuan	2
	1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB II	EVALUASI RENJA 2022, PERKIRAAN CAPAIAN RENJA 2023 DAN CAPAIN SERTA TARGET RENSTRA SKPD 2019-2024.....	3
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022	3
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.....	11
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas PD.....	12
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	19
	3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	19
	3.2. Program dan Kegiatan.....	20
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	26
BAB V	PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja satuan kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 Tahun yang berisikan kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan Renja OPD yang merupakan tahapan awal perencanaan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen RPKD.

Dalam proses penyusunan Renja OPD ini mengacu pada perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam RKPD yang merupakan jabaran penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta prakiran maju berdasarkan program prioritas RENSTRA OPD. RENJA OPD ini juga dapat dijadikan dasar dalam proses penyusunan Renja Kementrian dan Lembaga serta Rencana Kerja OPD, yang merupakan suatu tahapan penyusunan Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah 1 tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2008 tentang, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku adalah sebagai perwujudan mekanisme koordinasi dan konsolidasi dan perencanaan, pembangunan penanggulangan Bencana pada tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana adalah:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Maluku.
2. Merumuskan Program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam RKPD yang merupakan jabaran penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas untuk periode 1 Tahun kedepan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR pernyataan dan komitmen Kepala Badan tentang Rencana Kerja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku tahun 2024.

BAB I. PENDAHULUAN, yang merupakan penjelasan umum, Latar belakang, landasan hukum penyusunan Renja SKPD, maksud dan tujuan penyusunan Renja serta sistematika Renja tahun 2024.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2022, yang merupakan deskripsi umum pencapaian hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan awal OPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, yang berisi Telaahan tentang kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD serta Program dan Kegiatan Tahun 2024.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD, yang berisi rumusan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025

BAB V. PENUTUP, menguraikan secara singkat tentang penegasan kembali penyusunan Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku 2024, serta harapan-harapan keberhasilan pelaksanaannya.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Untuk tahun anggaran 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku mendapat alokasi Anggaran belanja langsung untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Renja Tahun 2022 sebesar Rp. 8.943.066.079,- dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2022 mencapai Rp. 8.239.489.209,- (92,13%) dengan sisa anggaran Rp. 703.576.870,- (7,87%). Anggaran ini direalisasikan untuk membiayai 2 program dan 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

Untuk melihat evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan pencapaian renstra perangkat daerah tahun berjalan berdasarkan target dan hasil keluarannya berupa realisasi program/kegiatan (sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1), diharapkan keberhasilan kinerjanya mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2023.

TABEL 2.1 (T-C 29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN /BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019- 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI TARGET RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)	7		8	9 = (8 / 7) x 10 ⁻²
1					2	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		5	6	7	8	9 = (8 / 7) x 10 ⁻²	10	11 = (6 + 8 + 10) / 3	12 = (11 / 5) x 10 ⁻²	
1	05					KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
1	05	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen / Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	3,00	
1	05	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	2,00	1,00	1,00	100	1,00	4,00	80%	
1	05	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen									
1	05	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1920,00	768,00	384,00	384,00	100,00	384,00	1536,00	80%	
1	05	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1	05	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen									

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN Pemerintahan DAERAH DAN SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019- 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
											TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI TARGET RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)	7		8	9 = $(8 / 7) \times 100$
1	05	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50,00	6,00	0,00	0,00	12%	0,00	6,00	12%	
1	05	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penujangan Perangkat Daerah	Persen									
1	05	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80%	
1	05	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80%	
1	05	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80%	
1	05	01	2.06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	120,00	48,00	24,00	24,00	100,00	24,00	96,00	80%	
1	05	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	56,00	25,00	12,00	12,00	100,00	45,00	80%		
1	05	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Unit									
1	05	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	20,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	45%		
1	05	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	4,00	80%		
1	05	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	46,00	12,00	10,00	10,00	100,00	34,00	74%		

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN SUB KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENS/TRA, PD) TAHUN 2019- 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
											TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI TARGET RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)	9 = $(8 / 7) \times 10^{\circ}$		11 = $(6 + 8 + 10)$	12 = $(11 / 5)$
1	05	01	2.08		2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	6	7	8	9 = $(8 / 7) \times 10^{\circ}$	10	11 = $(6 + 8 + 10)$	12 = $(11 / 5)$	
1	05	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	35,00	14,00	7,00	7,00	100,00	7,00	28,00	80%	
1	05	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	90,00	22,00	20,00	20,00	100,00	23,00	65,00	72%	
1	05	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen									
1	05	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	51,00	5,00	10,00	10,00	100,00	16,00	31,00	61%	
1	05	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	92,00	36,00	18,00	18,00	100,00	18,00	72,00	78%	
1	05	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80%	
1	05	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabili- tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	5,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80%	

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019- 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI TARGET RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)	7		8	9 = (8 / 7) x 100
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi											
1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	11,00	4,00	2,00	100,00	2,00	8,00	73%		
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	90,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	44%	
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	5,00	2,00	1,00	100,00	1,00	4,00	80%		

KODE	URUSAN/BIDANG		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN							
	URUSAN	BIDANG					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	7		8	9 = (8 / 7) x 100	10	11 = (6 + 8 + 10)	12 = (11 / 5)			
																	TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI TARGET RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)
																	TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	05	03	1.02	04	Paket	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1	05	03	1.02	05	Dokumen	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	33%							
1	05	03	1.02	06	Kawasan	11,00	2,00	100,00	2,00	8,00	0,00	73%							
1	05	03	1.02	08	Orang	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1	05	03	1.02	09	Dokumen	6,00	1,00	100,00	1,00	4,00	0,00	67%							
1	05	03	1.02	10	Orang	185,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	19%							
1	05	03	1.02	11	Dokumen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100%							
1	05	03	1.02	12	Keluarga	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI TARGET RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	05	03	1.03	04	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8 / 7) x 10 ⁻²	10	11 = (6 + 8 + 10) / 3	12 = (11 / 5) / 100
1	05	03	1.03	04	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8 / 7) x 10 ⁻²	10	11 = (6 + 8 + 10) / 3	12 = (11 / 5) / 100
1	05	03	1.03	04	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8 / 7) x 10 ⁻²	10	11 = (6 + 8 + 10) / 3	12 = (11 / 5) / 100
1	05	03	1.03	04	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8 / 7) x 10 ⁻²	10	11 = (6 + 8 + 10) / 3	12 = (11 / 5) / 100
1	05	03	1.03	01	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8 / 7) x 10 ⁻²	10	11 = (6 + 8 + 10) / 3	12 = (11 / 5) / 100
1	05	03	1.03	02	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8 / 7) x 10 ⁻²	10	11 = (6 + 8 + 10) / 3	12 = (11 / 5) / 100
1	05	03	1.03	03	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8 / 7) x 10 ⁻²	10	11 = (6 + 8 + 10) / 3	12 = (11 / 5) / 100
1	05	03	1.03	04	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8 / 7) x 10 ⁻²	10	11 = (6 + 8 + 10) / 3	12 = (11 / 5) / 100
1	05	03	1.03	05	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8 / 7) x 10 ⁻²	10	11 = (6 + 8 + 10) / 3	12 = (11 / 5) / 100
1	05	03	1.03	07	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8 / 7) x 10 ⁻²	10	11 = (6 + 8 + 10) / 3	12 = (11 / 5) / 100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, sebagai unsur pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana, maka tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku adalah ***“Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan otonomi Daerah di bidang Penanggulangan Bencana”***. Untuk melaksanakan tugas dimaksud maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku mempunyai fungsi :

- Melaksanakan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah lainnya di daerah lainnya di daerah, instansi vertical yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan;
- Pengkomandoan melalui perangkat SDM, peralatan dan logistik instansi terkait, instansi vertical yang ada di daerah dalam rangka penanggulangan darurat bencana;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan OPD Lainnya di daerah, instansi vertical yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Perumusan program di bidang penanggulangan bencana sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- Penyiapan penyusunan kebijakan pedoman penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- Perencanaan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Penyiapan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana;
- Penyiapan Penyusunan Prosedur tetap penanggulangan bencana;
- Penyiapan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun dalam bentuk kondisi darurat bencana;
- Penyelenggaraan administrasi penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Terhadap tugas dan fungsi diatas maka BPBD Provinsi Maluku telah menetapkan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi terkait dengan pelayanan publik dengan capaian kinerja rata-rata diatas 90 Persen.

TABEL 2.2 (T-C.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun Ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	15	17	
1	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Penanganan Pra Bencana			100%	100%	100%	100%	100%	81,81%	100%	100%	
3	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana			100%	100%	100%	100%	71,43%	100%	100%	100%	
4	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam tahun 2022, kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah cukup memenuhi target yang telah direncanakan pada setiap kegiatan. Hal ini dapat tercapai karena dalam penyusunan RENJA tahun 2022 berpedoman pada Rencana Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan senantiasa memperhatikan kondisi geografis Provinsi Maluku yang berada pada wilayah yang rawan bencana, sehingga dalam menyusun renja ini diharapkan adanya sinergitas dalam penanganan kebencanaan yang ada di wilayah Provinsi Maluku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku masih menemui permasalahan dan hambatan meliputi:

1. Pra Bencana

- Minimnya data, peta, pedoman dan regulasi serta SOP dalam penanggulangan bencana.
- Belum Memadainya Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur di bidang kebencanaan.
- Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/system pelaporan data dan informasi kebencanaan.
- Masih minimnya kapasitas masyarakat dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan kesiapsiagaan bencana khususnya yang berdomisili di wilayah resiko bencana yang tinggi.
- Dampak perubahan iklim yang menimbulkan berbagai ancaman bencana hidrometeorologi di Provinsi Maluku seperti Kekeringan, Tanah Longsor, Banjir, Cuaca eskترم dan bencana non alam seperti penyakit endemic DBD, Malaria dan Penyakit Berbasis Air yang mengganggu ketahanan dan sistem kehidupan.

2. Saat Bencana

- Masih terbatasnya sarana prasarana untuk melakukan fungsi koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat bencana.
- Masih terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Rancangan Awal RENJA Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Belum terbangunnya mekanisme informasi dan pelaporan kejadian bencana dari lokasi kejadian sampai ke Kabupaten dan mengkomunikasikan ke pemangku kepentingan inti.
- Luasan cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.
- Kurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

3. Pasca Bencana

- Belum terpetakannya wilayah hunian sementara dan hunian tetap yang dapat dipertimbangkan untuk lokasi penyintas bencana.
- Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- Belum teridentifikasinya taksiran data asset dalam bentuk nilai yang menjadi bagian skenario terburuk dari dampak bencana.
- Belum teridentifikasi dan tersusunnya kegiatan-kegiatan pemulihan baik secara psikologis, sosial, ekonomi, budaya.

Sedangkan berdasarkan Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku, maka yang menjadi isu – isu Strategis antara lain:

1. Meningkatkan fungsi koordinasi BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul stakeholder yang ada, baik internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengurangan risiko bencana dan cara menghadapinya.
3. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai sesuai standar minimal BNPB.
4. Meningkatkan kompetensi personil kebencanaan baik secara mandiri maupun dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
5. Pola pembangunan yang masih mengabaikan risiko bencana dan belum sepenuhnya menjadikan masalah ini kedalam prioritas pembangunan.
6. Membangun sistem informasi bencana yang terintegrasi ke seluruh stakeholder.
7. Meningkatkan upaya penanganan bencana yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti banjir, tanah longsor, angin putting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan yang belum tertangani dengan baik.
8. Meningkatkan fasilitasi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan bagi korban bencana.
9. Meningkatkan kerjasama dengan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan baik pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Tantangan dan peluang untuk pengembangan dan pelayanan BPBD Provinsi Maluku, antara lain:

❖ Tantangan:

- a) Belum semua regulasi penjabaran dari Undang undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah ditetapkan;
- b) Belum adanya standart operational procedure (SOP) dalam penanggulangan bencana;
- c) Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana;
- d) Belum terpenuhinya peralatan dan sarana penanggulangan bencana yang ideal;
- e) Rencana Operasi tidak selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan bencana;
- f) Masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

❖ Peluang:

- a) Adanya Undang undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21, 22, dan 23 tahun 2008;
- b) Adanya kebijakan tentang penanggulangan bencana;
- c) Harapan masyarakat tentang penanggulangan bencana semakin meningkat;
- d) Adanya dukungan dana APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
- e) Kerjasama dengan Organisasi-organisasi penanggulangan bencana, perguruan tinggi, departemen, LSM, Dinas/Instansi lain dan swasta.

2.4 Review Usulan Program dan Kegiatan PD

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku ditinjau dari jumlah program dan kegiatan serta sub kegiatan setelah mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, pada umumnya sama sesuai dengan hasil analisis dan kebutuhan yang terdapat pada Renstra BPBD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Namun demikian terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terutama yang terkait dengan anggaran, antara lain sebagai berikut:

- Terdapat 1 (satu) program teknis yaitu program penanggulangan bencana, 4 (empat) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan;

- Dari total 26 (dua puluh enam) sub kegiatan teknis, terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dialokasikan anggarannya didalam Renja BPBD Provinsi Maluku karena sub kegiatan tersebut merupakan kegiatan tanggap darurat bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- Sub kegiatan tersebut antara lain: Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas, Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana, Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, dan Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit;

Review terhadap rancangan awal RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel 2.4;

TABEL 2.4 (T-C 31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING	
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	500.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	500.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ambon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	500.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ambon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	500.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.230.206.684	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.230.206.684
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ambon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	4.176.926.684	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ambon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	4.176.926.684
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ambon	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Orang	53.280.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ambon	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Orang	53.280.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		250.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		250.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ambon & Luar daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	250.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ambon & Luar daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	250.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah		410.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah		410.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ambon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ambon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	30.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ambon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ambon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ambon	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ambon	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	30.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ambon	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ambon	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab/Kota dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab/Kota dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	200.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		800.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		800.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ambon	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit kendaraan R4	400.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ambon	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit kendaraan R4	400.000.000	
	Pengadaan Mebel	Ambon	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	200.000.000	Pengadaan Mebel	Ambon	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	200.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ambon	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ambon	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		847.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		847.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ambon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	165.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ambon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	165.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ambon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	681.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ambon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	681.500.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara		1.600.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara		1.600.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ambon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit kendaraan n R4 dan 8 unit Kendaraan n R2,	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ambon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit kendaraan n R4 dan 8 unit Kendaraan n R2,	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ambon	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit kendaraan n R4 dan 6 unit Kendaraan n R2,	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ambon	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit kendaraan n R4 dan 6 unit Kendaraan n R2,	300.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ambon	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ambon	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	100.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ambon	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 unit	1.100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ambon	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 unit	1.100.000.000	
	PROGRAM PENWANGGULANGAN BENCANA				5.000.000.000	PROGRAM PENWANGGULANGAN BENCANA				5.000.000.000	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi				550.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi				550.000.000	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Tual	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Ditegalisasi	1 dokumen	250.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Tual	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Ditegalisasi	1 dokumen	250.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING	
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Kab. Bursel dan Aru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	200 orang	300.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Kab. Bursel dan Aru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	200 orang	300.000.000
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				2.750.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				2.750.000.000
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Kab. Malra dan Kota Tual	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 orang	200.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Kab. Malra dan Kota Tual	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 orang	200.000.000
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	11 kab/kota	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 dokumen	350.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	11 kab/kota	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 dokumen	350.000.000
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Ambon	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 paket	450.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Ambon	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 paket	450.000.000
	Pengelolaan Risiko Bencana	Kab. Maluku Barat Daya	Jumlah dokumen analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana	1 dokumen	200.000.000	Pengelolaan Risiko Bencana	Kab. Maluku Barat Daya	Jumlah dokumen analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana	1 dokumen	200.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Kepulauan Tanimbar	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1 kawasan	250.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Kepulauan Tanimbar	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1 kawasan	250.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Ambon	Jumlah personel TRC tingkat provinsi yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya dalam melaksanakan penangan awal darurat bencana	80 orang	250.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Ambon	Jumlah personel TRC tingkat provinsi yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya dalam melaksanakan penangan awal darurat bencana	80 orang	250.000.000	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Maluku Tengah (Banda) dan SBT	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi	2 dokumen	300.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Maluku Tengah (Banda) dan SBT	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi	2 dokumen	300.000.000	
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Maluku Tengah (Banda)	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	150 orang	250.000.000	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Maluku Tengah (Banda)	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	150 orang	250.000.000	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Buru, Bursel dan SBT	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	400 keluarga	500.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Buru, Bursel dan SBT	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	400 keluarga	500.000.000	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				400.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				400.000.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Gudang Logistik BPBD Provinsi	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	300 orang	400.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Gudang Logistik BPBD Provinsi	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	300 orang	400.000.000	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				1.300.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				1.300.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Ambon	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Ambon	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	100.000.000	
	Penguatan Kelembagaan Daerah	Ambon	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah	1 Dokumen	100.000.000	Penguatan Kelembagaan Daerah	Ambon	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah	1 Dokumen	100.000.000	
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Ambon	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 dokumen	200.000.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Ambon	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 dokumen	200.000.000	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Ambon	Jumlah data dan informasi kebencanaan	1 dokumen	250.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Ambon	Jumlah data dan informasi kebencanaan	1 dokumen	250.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku	kab/kota	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan Bencana	1 Laporan	250.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku	kab/kota	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan Bencana	1 Laporan	250.000.000	
	Penanganan Pasca Bencana	11 kab/kota	Jumlah dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) yang disusun	1 dokumen	500.000.000	Penanganan Pasca Bencana	11 kab/kota	Jumlah dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) yang disusun	1 dokumen	500.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tugas dan fungsi BPBD adalah koordinasi, komando dan pelaksana, dikaitkan dengan penanganan sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana, ketiga tahapan ini BPBD Provinsi Maluku melakukan kegiatan seperti **(pra bencana)** adalah sosialisasi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, serta pengadaan peralatan dini tsunami. **Saat bencana/tanggap darurat** yang dilaksanakan selama tahun 2022 untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat seperti penyediaan dan penyiapan logistik darurat penanggulangan bencana, pelatihan/bimtek manajemen tempat pengungsi dan peralatan SAR pemukiman, pendampingan penanganan kejadian bencana, Sedangkan **tahapan pasca bencana**, lebih difokuskan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pemulihan sosial ekonomi, kegiatan identifikasi, verifikasi, inventarisasi dan evaluasi pelaporan pasca bencana dengan obyek kegiatan adalah melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran Renja OPD didasarkan atas rumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD yang berkaitan dengan target kinerja Renstra OPD. Tujuan dan sasaran Renja OPD dapat dilihat dalam tabel tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagai berikut:

TABEL. 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD TAHUN 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENJA
1	2	3	4
Meningkatkan sistem akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Meningkatnya penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100%
		Persentase pelayanan penunjang urusan dalam tata kelola pemerintahan	100%
Mewujudkan ketangguhan daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana	Meningkatkan indeks kapasitas ketahanan daerah menghadapi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%
		Persentase penanganan pra bencana	100%
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%

Selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah dibidang Penanggulangan Bencana maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku adalah “Mewujudkan ketangguhan daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Adapaun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku adalah “Meningkatkan indeks kapasitas ketahanan daerah menghadapi bencana”.

3.2 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur dalam RPJMD 2019-2024 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku 2019-2024, dalam tahun anggaran 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku merencanakan 2 program, 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan.

Rencana Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 tersebar pada Kab / Kota.

Rencana kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 14.137.206.684,-**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 ini berangkat dari pelaksanaan proses koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi pada rapat/forum koordinasi perencanaan pembangunan penanggulangan bencana di tingkat daerah maupun tingkat pusat tahun 2023.

Program prioritas adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu-isu strategis tahun 2024 seperti tersebut pada Bab terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku diarahkan pada “Meningkatnya indeks kapasitas ketahanan daerah menghadapi bencana”. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan pada tabel 4.1.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN PERIODENSTRASIA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKTIK KINERJA CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	
1	1.05.01.1.06.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berasaskan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berasaskan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang			12 Orang	250.000.000,00	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	BPBD Provinsi Maluku	10 Orang	202.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%			-	410.000.000,00	-	-	-	100%	430.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Semua Kei Desa Kota Ambon, Nusanawe, Nusanawe	-	-	1 Paket	31.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	100.000.000,00	Kota Ambon, Nusanawe, Nusanawe	-	-	1 Paket	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	30.000.000,00	Kota Ambon, Nusanawe, Nusanawe	-	-	1 Paket	31.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0008	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	450 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Ambon, Nusanawe, Nusanawe	-	-	450 Laporan	52.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			7 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Semua Kei Desa	-	7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance	12 Laporan	210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah yang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			100%	800.000.000,00	-	-	BPBD Provinsi Maluku	100%	840.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDAMIAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS NASIONAL	PRIORITYAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		KELMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	400.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusanawe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPBD Provinsi Maluku	4 Unit	420.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	200.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusanawe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPBD Provinsi Maluku	1 Paket	210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			12 Unit	200.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusanawe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPBD Provinsi Maluku	1 Unit	210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1.05.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			-	847.000.000,00	-	-	-	-	-	100%	889.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayan Umum, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan			1 Laporan	165.500.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusanawe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	7 Laporan	173.775.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan			1 Laporan	681.500.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusanawe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	25 Laporan	719.575.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1.05.01.1.09			Pemeliharaan Baring Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100%	1.000.000.000,00	-	-	-	-	BPBD Provinsi Maluku	100%	1.080.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			9 Unit	100.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusanawe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPBD Provinsi Maluku	20 Unit	105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorangan	20 Unit			18 Unit	300.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusanawe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPBD Provinsi Maluku	20 Unit	315.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			50 Unit	100.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusanawe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPBD Provinsi Maluku	1 Unit	105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET BELAKA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEIDANAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB	
						TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET
1	1.05.01.1.09.0009	Peningkatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1.100.000.000,00	Kota Ambon, Nusanawe, Nusanawe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1 Unit	1.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Menurunkan Indeks Risiko Bencana Provinsi Menurunkan Indeks Risiko Bencana Meningkatnya Indeks Kapasitas daerah	0,77 Indeks 150.850RHS 150,95 Nilai 0,77 Indeks		450.950 Indeks 150,95 Nilai 0,77 Indeks	5.500.000.000,00					0,77 Indeks 150.850RHS 150,95 Nilai 0,77 Indeks	5.775.000.000,00	
1.05.03.1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase pelayanan informasi rawan bencana provinsi	100%		100%	500.000.000,00					100%	577.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.01.0002		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)												
1.05.03.1.01.0003		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melakukan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) /Lintas Kabupaten/Kota	3 Orang		70 Orang	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		3 Orang	315.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Ditegalkan	0 Dokumen		1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun lingkungan Hidup, Men ingatkan Masyarakat Dan Perubahan Iklim	1. Pencegahan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	0 Dokumen	200.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		100%	2.050.000.000,00			Membangun lingkungan Hidup, Men ingatkan Masyarakat Dan Perubahan Iklim	1. Pencegahan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	100%	2.762.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02.0013		Peningkatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN BENA OPD TAHUN 2022	PRAKTIK CAPAIAN TARGET BENA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEINDAHAN				PRAMIRA MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	1.00.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100%	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							100 %	1.900.000.000,00			-	1. Percepatan penanganan penanganan bencana memastikan dan pengurangan	Masyarakat dan Aparatur Penanggulangan Bencana	100%	1.900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.00.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	4 Keluarga			50 Keluarga	500.000.000,00	Kab. Seram Bagian Timur, Kecamatan Seroke, Keli Desa Kab. Butu Selatan, Semua Kecamatan, Kecamatan, Semua Keli Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanganan bencana dan pengurangan	Masyarakat dan Aparatur Penanggulangan Bencana	4 Keluarga	525.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.00.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengalihan Kelembagaan Pasca Bencana (JITU/PASMA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RSP) yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Mengingat Kehilangan Bencana dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanganan bencana memastikan dan pengurangan	Masyarakat dan Aparatur Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	525.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.00.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Mengingat Kehilangan Bencana dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanganan bencana memastikan dan pengurangan	Masyarakat dan Aparatur Penanggulangan Bencana	0 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.00.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah der jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Mengingat Kehilangan Bencana dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanganan bencana memastikan dan pengurangan	Masyarakat dan Aparatur Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	202.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.00.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN PERIODE REGISTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang diagalkan	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Ambon, Nusahwe, Nusahwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Men ingatkan Kebutuhan bencana dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat dan Aparatur Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.00.03.1.04.0019		1.00.03.1.04.0019	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan komitmen penanggulangan bencana @ seluruh kabupaten (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Ambon, Nusahwe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Men ingatkan Kebutuhan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat dan Aparatur Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.00.03.1.04.0020		1.00.03.1.04.0020	Jumlah Kabupaten Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten Kota	1 Kabupaten/ kota			6 Kabupaten/ kota	250.000.000,00	Semua Kota, Kab, Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat dan Aparatur Penanggulangan Bencana	1 Kabupaten/ kota	202.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JUMLAH															14.137.206.684,00	14.844.067.918,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan sebagai acuan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku, untuk itu keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada Renja ini pada akhirnya akan sangat tergantung kepada alokasi anggaran dan etos kerja yang tinggi serta keseriusan seluruh penyelenggara pemerintahan dan pembangunan pada jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Maluku, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

Demikian pokok-pokok Dokumen Renja Tahun 2024 kami buat, dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang kinerja BPBD Provinsi Maluku dan juga untuk mengetahui permasalahan pada pada program kerja Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja tahun 2024, disamping itu dokumen ini merupakan bahan masukan untuk pihak pengambil kebijakan dalam meningkatkan ketangguhan daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi Maluku.

Ambon, Maret 2023

**Kepala Pelaksana
BPBD Provinsi Maluku,**



Ir. ISMAIL USEMAHU, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19650413 199303 1 009